



PKL Kuliner Sebut Lapak Kurang Layak

■ Pemkot Tegaskan Berikan Tempat Terbaik di Teras Malioboro

YOGYA. TRIBUN - Sehari menjelang relokasi, pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta masih mengeluhkan kondisi lapak Teras Malioboro yang dinilai kurang representatif. Keuhuan itu, terutama, dirasakan pedagang yang sehari-hari menjajakan kuliner.

Ketua Paguyuban PKL Handayani, Sogi Wartono, menuturkan, komunitasnya menaungi sebanyak 59 pedagang berizin dan sesuai rencana bakal direlokasi menuju Teras Malioboro I, atau gedung eks Bioskop Indra. Tetapi, setelah melihat keadaan lapak baru, ia pun merasa kurang sreng.

Lahan (lana) yang saya tempati itu, panjang tiga meter, lebar sekitar 2,5 meter. Tapi, sekarang cuma diganti 1 meter persegi. Semua kuliner, yang lesihan juga begitu, tidak ada yang layak," tandas Sogi, saat mendampingi pusat verifikasi data PKL Malioboro di Kantor UPT Cagar Budaya, Selasa (25/1).

Menurutnya, Pemda DIY, maupun Pemkot Yogyakarta, tidak transparan dalam proses relokasi ini karena besaran lapak sama sekali tak diinformasikan sejak jauh hari. Menurutny, besaran lapak yang semua disamakan tanpa melihat komoditas, sanggah mengukir kalangannya.

"Lha kok saya sima paguyuban angringran itu (lapaknya) sama. Lapak kita duhunya segitu, kalau angringran itu cuma 1,5 meter, kok dibu-

■ MENJELANG RELOKASI

- PKL di kawasan Malioboro masih mengeluhkan kondisi lapak Teras Malioboro.
- Mereka menilai ukuran lapak kurang layak untuk berjualan.
- Pemkot mengklaim mereka memberikan yang terbaik bagi para PKL.
- Pansus DPRD Kota meminta ada ruang dialog bagi pedagang dan juga pemerintah.

at sama, seharusnya dibedakan," tutur pedagang kuliner yang melapak pagi-sore itu.

"Bayangkan ya, kalau pas hari ramai, orang makan bareng-bareng begitu, kalau meja kecil-kecil, kan nggak bisa. Nanti, mending gelar tikar saja di sana," imbuhs Sogi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, berharap para pedagang jangan terburu-buru memberikan penilaian buruk mengenai Teras Malioboro. Sebab, bersama Pemda DIY, pihaknya sudah merancang skema terbaik, supaya PKL tetap eksis di kawasan Malioboro.

"Ya, kita akan atur sejumlah rupa, ini masih proses juga. Pembangunan Teras Malioboro baru awalan, ke depannya tentu masih ada pengembangan-pengembangan lanjutan, sehingga makin

baik bagi pedagang," urusnya. Oleh sebab itu, Wawali pun meyakinkan semua PKL, agar tidak perlu khawatir, karena telah disiapkan upaya lanjutan agar aktivitas ekonomi di Malioboro tetap bergeliat. Meski lapak-lapak dipindahkan, lanjutnya, seluruh pedagang dipastikan senantiasa memperoleh perhatian.

"Malah semakin baik, dibuktikan saja, dilihat nanti, ya. Saya yakin, itu kalau sudah selesai ditata, pasti responsnya, oh jebulane koyo nggne", begitu," katanya.

■ Berdialog

Sementara itu, kalangan legislatif mendesak Pemkot Yogyakarta agar memproleh jalur dialog dengan PKL Malioboro. Hal tersebut, untuk menanggapi keluhan soal lapak-lapak Teras Malioboro yang dinilai kurang representatif lantaran terlampau kecil.

Ketua Pansus Relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardianto, menyampaikan, ke depannya para pedagang bakal melanjutkan hidup melalui lapak tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Sehingga, pemerintah harus memastikan kelayakan titik keputusan itu.

"Mereka itu yang akan menempati sehari-hari di sana. Nah, harapan saya, kawan-kawan PKL, dan esesekitif, bersama-sama melihat situasi di lapangan. Apalagi, lokasinya itu proyek baru juga," ujarnya. Dengan duduk bersama, ucap Fokki, kedua pihak pun dapat saling memerli masuk-an, soal keresahan-keresahan yang dirasakan di masa transisi. Menurutny, proses relokasi otomatis berjalan lancar, jikalau digulirkan secara fair, transparan, serta tak ada yang ditutup-tutupi.

"Kira-kira yang tepat dan nyaman bagi teman-teman PKL, seperti apa. Kemudian, kemampuan pemerintah untuk menuruti bisa sampai sejauh mana. Dialog itu penting," katanya.

Terlebih, politikus PDI Perjuangan itu mengatakakan, PKL sejak awal tidak menolak kebijakan relokasi ini. Dengan catatan, prosesnya berlangsung secara seksama dan melibatkan semua pihak termasuk pedagang.

"Sebenarnya kawan-kawan PKL itu, setelahnya, ingin lebih dimonustakan, ingin lebih diajak rembugan dalam proses relokasi ini, agar semua jelas. Toh, mereka gatisnya kan bukan menolak relokasi," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005